

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik di Indonesia baik pusat maupun daerah dalam setiap penyelenggaraan pemerintahannya dituntut untuk selalu akuntabilitas dan transparansi mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah di Indonesia, yakni perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.² Perubahan tersebut berlaku sejak tahun 2015 sebagai bentuk upaya konkrit pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintahan yang lebih baik.

Penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu,

² Dean Sastra Nagara dan Sri Mulyani, "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diukur Menggunakan Parameter Nice," *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3, no. 2 (2019): hal. 136.

kualitas penyajian laporan keuangan berkaitan dengan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah bukan hanya berupa penyajian angka-angka saja, namun juga terkait dengan pengelolaan keuangan di dalam suatu pemerintah daerah.³

Di dalam Islam juga diperintahkan untuk selalu akuntabilitas dan tranparansi dalam penyajian sebuah laporan keuangan. Hal tersebut tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا... (البقرة/2: 282)

282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.... (Al-Baqarah/2:282)

Kandungan dalam potongan ayat tersebut menerangkan bahwa adanya perintah kepada orang-orang mukmin untuk melakukan pencatatan setiap adanya kegiatan bermu'amalah secara tunai maupun *non-tunai*. Pencatatan transaksi tersebut harus dilakukan dengan benar tanpa adanya pengurangan sedikitpun. Maka dengan begitu, kaitannya ayat ini dengan penyajian laporan keuangan yaitu bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam menyajikan sebuah laporan keuangan yang menggambarkan keadaan keuangan sebenarnya diikuti dengan bukti pendukung transaksi yang dapat

³ Amrie Firmansyah, Muhamad Rizal Yuniar, dan Zef Arfiansyah, "Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Dan Karakteristik Pemerintah Daerah," *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* 4, no. 2 (2022): hal. 182-183.

⁴ Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hal. 63.

dipertanggungjawabkan kebenarannya agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Suatu laporan keuangan juga dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, serta bebas dari kesalahan material dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan terkait transaksi keuangan. Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan tersebut merupakan hal yang sangat penting agar dapat mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan anggaran pemerintah pusat maupun daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.⁵

⁵ Rizki Afri Mulia, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)," *Jurnal El-Riyasah* 9, no. 1 (2018): hal. 8.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, jika tidak memenuhi maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan tidak efektifan.⁶

Setiap tahunnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan mendapatkan penilaian opini audit dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat lima jenis penilaian opini audit laporan keuangan yang diberikan BPK, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).⁷ Apabila BPK memberikan opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) artinya laporan keuangan entitas tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

BPK telah menyajikan perkembangan opini terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Selama lima tahun terakhir (2018-2022), opini LKPD mengalami

⁶ Dyah Puri Surastiani dan Bestari Dwi Handayani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 7 No. (2015): hal. 140.

⁷ Badar Murifal et al., *Pemeriksaan Akuntansi Teori dan Kasus*, Edisi Pert (Yogyakarta: Expert, 2021), hal. 52.

perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 9%, yaitu dari 82% pada LKPD Tahun 2018 menjadi 91% pada LKPD Tahun 2022. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 8% dari 16% pada LKPD Tahun 2018 menjadi 8% pada LKPD Tahun 2022. Berikut merupakan grafik perkembangan LKPD yang dirilis oleh BPK RI pada tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2018-2022



Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2023 diolah, 2024

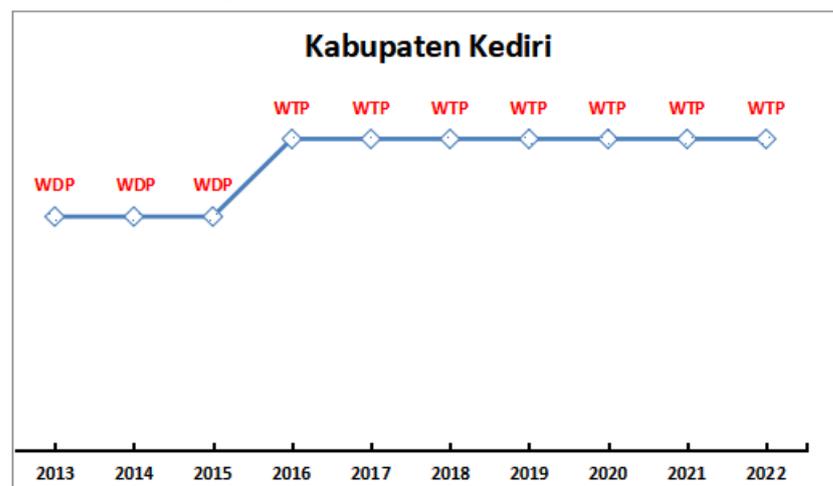
Akan tetapi, meskipun data BPK memperlihatkan perkembangan opini LKPD semakin membaik dari tahun ke tahun, namun masih terdapat beberapa LKPD mengalami penurunan opini. Apabila dibandingkan dengan capaian tahunan 2021, jumlah LKPD Tahun 2022 yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan 4 LKPD yaitu sebanyak 500 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP di Tahun 2021 menurun menjadi 496 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP di Tahun 2022.

BPK dalam memberikan opini WTP menerapkan beberapa kriteria yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, defektivitas

pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundangan-undangan. Jadi selama empat kriteria tersebut dipenuhi, BPK akan memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Masyarakat selaku pemegang kepentingan (*stakeholder*) pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah. Untuk menilai kinerja pemerintah secara akurat tentunya masyarakat membutuhkan laporan keuangan yang berkualitas.⁸

LKPD Pemerintah Kabupaten Kediri selama enam tahun terakhir pada tahun 2016 sampai tahun 2022 selalu mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan grafik perkembangan opini LKPD Kabupaten Kediri yang dirilis oleh BPK Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebagai berikut:

Gambar 1. 2
Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2013-2022



Sumber: www.jatim.bpk.go.id – LKPD Kabupaten Kediri diolah, 2024

⁸ Nagara dan Mulyani, “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diukur Menggunakan Parameter Nice,” hal. 136.

Meskipun begitu, opini tersebut bukan merupakan sebuah jaminan tidak adanya penyimpangan pengelolaan keuangan. Berdasarkan fenomena yang pernah terjadi di Kabupaten Kediri masih ditemukan adanya kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala atau perangkat desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2020, terdapat dua kasus dugaan penyelewengan dana desa yang berada di Desa Selopanggung Kecamatan Semen dan Desa Wanengpateng Kecamatan Gampengrejo yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Kasus dugaan penyelewengan ADD di Desa Wanengpaten sudah naik tahap penyidikan dengan memeriksa dana desa tahun 2016-2019 dengan estimasi kerugian Rp 200juta. Sedangkan, Desa Selopanggung masih dalam penyelidikan.⁹

Kemudian, di tahun 2022 terdapat kasus penyelewengan dana desa oleh oknum kepala desa Kras Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penyidikan menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 587.451.604. Kepala desa Kras ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyelewengan dana desa tersebut dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 100juta yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.¹⁰

⁹ Nanang Masyhari, "Penanganan Kasus Korupsi di Kejari Kabupaten Kediri Terkendala Covid-19," 16 April 2022, 2022, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/penanganan-kasus-korupsi-di-kejari-kabupaten-kediri-terkendala-covid-19/>.

¹⁰ Agung K Jatmiko, "Kades Kras Kediri Korupsi Dana Desa Setengah Miliar Lebih," 2024, <https://www.teras.id/read/532662/kades-kras-kediri-korupsi-dana-desa-setengah-miliar-lebih>.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan pusat maupun daerah, melainkan menjadi luas pada sektor pemerintahan desa. Maka dari itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik agar terhindar dari kegiatan korupsi/penggelapan dana keuangan desa.¹¹

Laporan keuangan desa merupakan *output* layanan yang merefleksikan kinerja pemerintahan desa. Laporan ini juga merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada *stakeholders*.¹² Untuk itu, diperlukan juga penerapan *Good Public Governance* pada sektor pemerintahan desa agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah harus didukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

¹¹ Teguh Erawati dan Antonius Sahaduta Hamanay, "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi kasus pada Desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman)," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2022): hal. 17-18.

¹² M Anas, Rr Forijati, dan Mochamad Muchson, "Pengaruh Good Public Governance (GPG) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kediri," *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 6, no. 1 (2021): hal. 132.

pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien, dan efektif.¹³

Terbentuknya laporan keuangan desa yang berkualitas juga didukung dengan adanya perangkat desa yang berkualitas. Perangkat desa merupakan faktor penting dalam terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Perangkat desa perlu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan dalam mengelola keuangan desa.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang kompeten dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya dilakukan oleh Agustiningtyas, dkk yang menyatakan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁵ Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Ira Gustina dan Siti Afrida yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

¹³ Kabupaten Paser Indonesia, "Lampiran 1 Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Kabupaten Paser," Pub. L. No. 55, 1 (2019), hal. 1.

¹⁴ Agus Wahyudi dan Diah Anggeraini Hasri, "Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 2 (2021): hal. 249.

¹⁵ Vika Erinna AgustiningTyas, Irma Tyasari, dan Doni Wirshandono Yogivaria, "Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Pada Opd Kota Malang," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 1–14.

keuangan.¹⁶ Berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan Erawati dan Hamanay yang menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁷ Penelitian oleh Retno juga menyatakan bahwa *good public governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masih adanya fenomena kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala atau perangkat desa serta masih terdapat adanya inkonsistensi penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga peneliti ingin meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada sektor pemerintahan desa, khususnya terkait penerapan *good public governance*, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Good Public Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri).”**

¹⁶ Ira Gustina dan Siti Afrida, “Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,” *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 1, no. 2 (2021): 78–91.

¹⁷ Erawati dan Hamanay, “Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi kasus pada Desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman).”

¹⁸ Retno Widia Astuti, “Pengaruh Good Public Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Ambon,” *Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2020): 39–51.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengacu pada bagaimana penerapan *good public governance*, sistem pengendalian internal, dan kualitas perangkat desa tersebut untuk mengetahui apakah dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa yang disajikan oleh pemerintahan desa Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Good Public Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Perangkat Desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada pemerintahan desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Apakah *Good Public Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada pemerintahan desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada pemerintahan desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
4. Apakah Kualitas Perangkat Desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada pemerintahan desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji secara simultan pengaruh *Good Public Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Perangkat Desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada pemerintahan desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
2. Menguji pengaruh *Good Public Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada pemerintahan desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
3. Menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada pemerintahan desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri; dan
4. Menguji pengaruh kualitas perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada pemerintahan desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan berupa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Akuntansi khususnya pada bidang Sektor Publik yang sedang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dalam penelitian ini akan dirasakan oleh beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Akademis

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan ilmu terutama dalam bidang ilmu Akuntansi dan diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian selanjutnya di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya mahasiswa prodi Akuntansi Syariah yang berfokus dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang nantinya akan menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama atau mirip.

b. Bagi Institusi

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan *literature* dalam memberikan masukan dan kontribusi kepada pemerintah dalam hal memberikan informasi yang sejujur-jujurnya guna memperlancar proses penyusunan laporan keuangan dalam sektor publik. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam hal pengoptimalan *Good Public Governance*, Sistem

Pengendalian Internal, dan Kualitas Perangkat Desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa pada Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

c. Bagi Pihak Lain

Adanya kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat desa Kecamatan Semen Kabupaten Kediri mengenai pentingnya adanya *Good Public Governance*, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Perangkat Desa yang diberikan untuk pemerintahan desa yang berguna untuk kemajuan perekonomian desa.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengkaji terkait *good public governance*, sistem pengendalian internal, dan kualitas perangkat desa. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Public Governance* (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Kualitas Perangkat Desa (X3) dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa (Y).

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak memiliki keterbatasan penelitian. Penelitian ini mengambil sampel dari perangkat desa yang bekerja di kantor-kantor desa yang berada di wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

G. Penegasan Istilah

Sejak awal peneliti perlu memaparkan penegasan istilah untuk memberikan dan memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar para pembaca nantinya dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Pengaruh *Good Public Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul penelitian ini. Adapun pemaparan penegasan istilah akan didefinisikan peneliti secara konseptual maupun operasional adalah sebagai berikut:

a. Definisi Konseptual Variabel

a) *Good Public Governance*

Good Public Governance (GPG) merupakan suatu sistem yang mengatur tata cara dan berbagai regulasi dalam berperilaku bagi institusi pemerintahan dalam menjalankan tugas melayani kepentingan publik secara akuntabel dan bertanggung jawab.¹⁹

b) Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

¹⁹ Anas, Forijati, dan Muchson, “Pengaruh Good Public Governance (GPG) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kediri,” hal. 133.

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁰

c) Kualitas Perangkat Desa

Kualitas perangkat desa merupakan kemampuan perangkat desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.²¹

d) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan

Kualitas laporan keuangan adalah kegiatan pelaporan yang didasarkan oleh karakteristik kualitatif informasi keuangan dengan pengungkapan secara penuh serta wajar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik dan memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.

b. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan penegasan secara konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari judul “Pengaruh *Good Public Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)” adalah adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan desa yang meliputi *Good Public Governance*,

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” Pub. L. No. 60 (2008), hal. 2.

²¹ Wahyudi dan Hasri, “Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa,” hal. 294.

Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Perangkat Desa yang dimiliki Pemerintah Desa Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang nantinya faktor-faktor tersebut dapat menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan mampu untuk menyusun laporan keuangan desa yang transparansi dan akuntabilitas.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran mengenai penulisan isi skripsi, maka pembahasan akan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian dengan berbagai penjelasan dan fenomena yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional variabel penelitian, dan sistematika penulisan penelitian untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti yang terdiri dari landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

BAB IV ANALIS DATA

Pada bab ini akan dipaparkan penjelasan mengenai deskripsi data penelitian beserta analisisnya yang sudah terorganisasi dengan baik. Selain itu, akan dipaparkan juga mengenai hipotesis penelitian yang diikuti dengan hasil pengujian beserta penjelasannya, serta akan disajikan paparan data dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil dari analisis data penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai hasil analisis data yang dihasilkan dan akan dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diperlukan yang berguna untuk diajukan penelitian sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.